

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE**  
**“GENDER ACTION BUDGET (GAB)”**  
**SUB KEGIATAN TA 2025**

Perangkat Daerah	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
Program	: Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Kode Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.03
Kinerja	: Adanya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
Indikator Satuan	: Meningkatkan partisipasi politik masyarakat : 51432 Orang

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
- d. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**2. Gambaran Umum**

Salah satu aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah Lembaga Demokrasi, dimana variabel yang ke 9 adalah Peran Partai Politik. Peranan Partai Politik sangat dominan dalam sebuah negara yang demokratis. Karena dengan adanya Partai Politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai tujuan dan cita-cita yang jelas, maka organisasi Partai Politik tersebut akan menjadi jembatan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya. Peranan Partai Politik tidak hanya sebagai organisasi politik, akan tetapi sebuah organisasi yang memberikan Pendidikan Politik pada masyarakat melalui Pendidikan Politik yang berlangsung secara teratur dan sistematis. Partai Politik mempunyai hak mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk Kota Pariaman telah dituangkan dalam Perwako Nomor 56 Tahun 2019. Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tata cara pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**B. Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat dari Sub Kegiatan ini adalah 8 Partai Politik

**C. Strategi untuk Mencapai Kinerja**

**(1) Metode Pelaksanaan** : Swakelola & Non Pengadaan

**(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Informasi responsif gender bagi pelaksana;
- Bantuan Keuangan Partai Politik ( Bulan 5)
- Pendidikan politik ( Bulan 5)
- Pemantauan Situasi Politik ( Bulan 1-11)

**D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Sub Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 11 bulan (Januari - November)

**E. Biaya yang Dikeluarkan**

Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 1.187.000.000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Pariaman, Juli 2024  
Penanggung Jawab Kegiatan



**FERRY FERDIAN B.P. S.STP., M.Si**  
NIP. 19830216 200112 1 002



## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Langkah 1	Identifikasi Isu/Masalah Gender - Masih timpangnya peminat / anggota antara laki-laki dan perempuan dalam partai politik
Langkah 2	Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab - Status ekonomi dan materi - SDM yang tidak mencukupi - Belum terlaksananya pemilihan anggota secara demokratis
Langkah 3	Kerangka Kerja Logis - <i>Impact</i> - Meningkatnya Kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia Partai Politik - <i>Outcome</i> - Meningkatnya Persentase Anggota Perempuan dalam Partai Politik - <i>Output</i> - Jumlah anggota perempuan laki-laki tidak mengalami ketimpangan  Rencana Aksi - Informasi responsif gender bagi pelaksana; - Bantuan Keuangan Partai Politik - Pendidikan politik - Pemantauan Situasi Politik
Langkah 4	Identifikasi Unit Pelaksana - Kasi Orpolmas

No.	Pertanyaan	Hasil Reviu
1	Bagaimana gambaran Sub Kegiatan?	<p>Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Partai Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Kinerja Sub Kegiatan : Adanya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Indikator Sub Kegiatan : Meningkatnya partisipasi politik masyarakat</p> <p>Satuan : 51432 Orang</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman</p>
2	Apa kontribusi Sub Kegiatan ini terhadap Rencana Aksi Lima Tahun yang telah disusun?	<p>Berdasarkan gambaran Sub Kegiatan yang telah dijelaskan pada butir 1, Sub Kegiatan ini berpotensi untuk melaksanakan Rencana Aksi sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Impact</i> - Meningkatnya Kesadaran perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia Partai Politik</li> <li>• <i>Outcome</i> - Meningkatnya Persentase Anggota Perempuan dalam Partai Politik</li> <li>• <i>Output</i> - Jumlah anggota perempuan laki-laki tidak mengalami ketimpangan</li> </ul>
3	Bagaimana kondisi Sub Kegiatan saat ini? Apakah sudah mengarusutamakan gender dari aspek: - Akses - Partisipasi - Kontrol - Manfaat	<p>Saat ini sub Kegiatan belum mengarusutamakan gender, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses : -</li> <li>- Partisipasi : Minat perempuan tidak begitu tinggi untuk berkontribusi dalam partai politik</li> <li>- Kontrol : Perempuan cenderung kurang diberi kesempatan untuk bergabung dan berpartisipasi dalam partai politik</li> <li>- Manfaat : -</li> </ul>

No.	Pertanyaan	Hasil Reviu
4	Apa faktor penyebab/ kendala belum mengarusutamakan gender? a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal	Penyebab Sub Kegiatan belum responsif gender: a. Faktor Internal - Terbatasnya jumlah SDM b. Faktor Eksternal - Rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik
5	Apa Rencana Aksi yang perlu dilakukan agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender?	Rencana Aksi agar Sub Kegiatan menjadi responsif gender: - Informasi responsif gender bagi pelaksana; - Bantuan Keuangan Partai Politik - Pendidikan politik - Pemantauan Situasi Politik

Pariaman, Juli 2024  
Penanggung Jawab Kegiatan



**FERRY FERDIAN B.P, S.STP., M.Si**  
NIP. 19830216 200112 1 002